

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN UMKM

Agus Widyarta<sup>1</sup>, Akmal Yuda Tama<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur  
*email* : agus.widiyarta.adneg@upnjatim.ac.id

### Abstrak

Seiring berkembangnya teknologi yang mendukung perkembangan bisnis sehingga saat ini banyak sekali macam-macam ide bisnis yang berkembang dan dijalankan di Indonesia saat ini Melalui PT Cybers Global Indonesia sebagai perusahaan yang juga peduli terhadap perkembangan bisnis bergerak di bidang komoditas Pengelolaan Usaha Kopi, Information Technology (IT), Properti, Perdagangan baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri, dan edukasi. Perusahaan ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan teknologi informasi yang terus berkembang dengan menciptakan efisiensi dan efektifitas untuk komoditi, hingga teknologi komunikasi, integrasi data system, internet dan data center. Dengan munculnya hal tersebut sebuah kolaborasi diperlukan antara sektor privat dengan sektor publik yaitu pemerintah yang dapat membantu para pelaku usaha untuk mengembangkan UMKM khususnya di bidang usaha kopi yang masih banyak melakukan usaha dengan cara manual belum terintegrasi dengan digital, diharapkan dengan adanya kolaborasi tersebut sektor atau bidang UMKM dapat lebih meningkat dan bisa berkolaborasi juga dengan teknologi yang berbasis digital yang telah tersedia di Indonesia.

**Kata Kunci** : Collaborative Governance, UMKM

### Abstract

Along with the development of technology that supports business development so that currently there are many kinds of business ideas that are developing and being implemented in Indonesia at this time Through PT Cybers Global Indonesia as a company that also cares about business development engaged in the commodity sector Coffee Business Management, Information Technology (IT ), Property, Trade both domestically and abroad, and education. This company was formed to meet the growing needs of information technology by creating efficiency and effectiveness for commodities, to communication technology, data system integration, internet and data centers. With the emergence of this, a collaboration is needed between the private sector and the public sector, namely the government which can help business actors to develop MSMEs, especially in the coffee business sector which still does a lot of business manually not integrated with digital, it is hoped that with this collaboration sector or fields MSMEs can improve and also collaborate with digital-based technologies that are already available in Indonesia.

**Keywords** : Collaborative Governance, MSMEs

### PENDAHULUAN

Sulitnya mencari lapangan pekerjaan khususnya di Indonesia dan juga mengingat banyak pekerjaan yang menggunakan media digital sebagai pendukung pekerjaan seiring mengikuti perkembangan zaman yang lebih modern sehingga memaksa manusia untuk mengikuti perkembangan teknologi yang juga semakin maju dan meningkat serta berkembang dengan pesat sehingga diperlukan perhatian-perhatian khusus dari pemerintah kepada masyarakat agar dapat memberikan edukasi akan tantangan pekerjaan di masa depan sebagaimana perkembangan teknologi kedepannya yang berdampak terhadap pekerjaan manusia. Dengan adanya teknologi berbagai macam pekerjaan saat ini dapat dilakukan lebih mudah karena terbantu adanya sebuah integrasi teknologi yang diluncurkan sebagai sebuah aplikasi yang dapat diakses pada perangkat keras yang dimiliki oleh kebanyakan orang saat ini seperti gawai hingga laptop.

Pemerintah sebagai penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan baik dan maksimal. Sejalan dengan konsep good governance yang mengutamakan keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat atau publik secara bersama-sama dalam penyelenggaraan pembangunan go digital maka kolaborasi antara ketiga

stakeholder tersebut sebagai pilar tata kelola pemerintahan yang baik harus dilakukan. Oleh karena itu sudah sewajarnya diperlukan kolaborasi atau kolaboratif dari pemerintah untuk mewujudkan digitalisasi UMKM.

Dalam mewujudkan kolaborasi pemerintah di Indonesia diperlukan dukungan dengan penuh baik dari sektor privat maupun sesama sektor publik yang bekerjasama dalam pengembangan UMKM yang ada di-Indonesia sehingga perekonomian di seluruh daerah dapat terdongkrak dan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju teknologinya melalui collaborative governance diharapkan seluruh pengusaha yang masih belum mampu mengikuti perkembangan zaman di era digital ini menjadi mampu setelah mengikuti program yang dirancang oleh PT. Cybers Global Indonesia yang bekerjasama dengan sektor publik sehingga para pelaku usaha tidak merasa kesulitan lagi dalam mengembangkan segala jenis bisnisnya.

## METODE

Collaborative Governance merupakan model dari satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan atau stakeholders non-state dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi consensus, deliberative dan ber tujuan membuat atau menerapkan kebijakan publik, mengelola program publik atau aset publik.

Collaborative Governance adalah jenis “governance” yang mendorong kerjasama dari pemilik kepentingan dan non-state untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan kolektif dan implementasi (Gray 1989; Bingham and O’Leary 2008; Farazmand 2004; Huxham dan Vangen 2000).

Menurut Alter dan Hage (1993) Upaya kolaborasi muncul sebagai sebuah pendekatan untuk mencapai tujuan secara fleksibel dengan pencapaian tujuan lebih kreatif dalam waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan organisasi bekerja sendiri. Konsep kolaborasi pemerintahan mengacu pada “sekelompok stakeholder yang saling ketergantungan, terdiri dari berbagai sektor yang bekerjasama dalam pengembangan serta melaksanakan kebijakan untuk menangani masalah kompleks atau situasi multifaced problem (Choi dan Robertson, 2014;495)

Menurut Choi (2014) Dalam pengaturan kelembagaan, menempatkan kolaborasi berada ditengah-tengah antara pemerintah dan warga negara, sehingga memiliki sebutan berbeda-beda.

## Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Mubyarto (1999) Bahwa pengembangan ekonomi kerakyatan membutuhkan keberpihakan dari pemerintah. Yang diaman pemihakan ini bertujuan untuk mewujudkan persaingan berjalan dengan sehat dan seimbang.

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, pemerintah daerah perlu membangun perannya untuk bersama-sama dengan rakyat mengelola segala kekayaan alam untuk kepentingan ekonomi rakyat. Penguatan sistem ekonomi kerakyatan ini bertujuan untuk membendung dan meminimalkan dampak-dampak negative yang muncul karena globalisasi ( Sunartiningsih dan Suyatna, 2009; 132)

Kemitraan yang dibanung merupakan kemitraan yang tidak dipaksakan, tetapi kemitraan yang saling membutuhkan, menguatkan, dan saling menguntungkan. Dengan kondisi yang demikian, kemitraan bisa terbentuk secara efisien (Hamid, 2005; 44-45)

Darwanto (2013:142-149) melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan UMKM dalam perekonomian di Indonesia. UMKM sebagai bagian dari perekonomian juga harus lebih meningkatkan daya saing dengan melakukan inovasi. Keunggulan bersaing berbasis inovasi dan kreativitas harus lebih diutamakan karena mempunyai daya tahan dan jangka waktu lebih panjang.

Penelitian oleh Supriyanto (2006:1) dapat dilihat kesimpulan penelitiannya ternyata UMKM mampu menjadi solusi dari penanganan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata dari sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja,

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penerapannya tentang pengembangan usaha khususnya mengupayakan para pelaku usaha agar dapat kesempatan memperluas usaha dengan mengikuti perkembangan teknologi. Selama melakukan penelitian dalam mengembangkan bisnis UMKM yang telah dilakukan ditemukan banyak sekali permasalahan yang ada dengan keinginan yang besar dari para pengusaha khususnya usaha

warung kopi. Dari PT Cybers Global Indonesia sendiri juga telah menyediakan beberapa fasilitas umum yang dapat dipakai jika nantinya para pengusaha telah bermitra untuk mengembangkan UMKM Bersama Warkop Digital yaitu Pelatihan layanan Digital, Pelatihan Menjadi Barista, Pelatihan Pengelolaan Kedai Kopi

Berbagai hasil yang telah dilakukan disajikan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Mengembangkan UMKM

No	Nama Tempat	Alamat	Hasil
1	Omah Boto	Jl. Kutisari XI No.41, Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota SBY, Jawa Timur 60291	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Owner masih ditahap 50% tertarik dan membutuhkan waktu untuk kepastian dalam menjalin kemitraan WD</li> <li>2. Untuk layanan pembayaran digital sudah ada seperti QRIS</li> <li>3. Adanya hydrant terkait keamanan dalam setiap tempat bila terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan</li> <li>4. Owner 50% tertarik karena kalau semisal menjalin mitra dengan WD seperti bidang layanan digitalisasi seperti PPOB, QRIS, Pelatihan digital, dan juga peralatan kopi</li> </ol>
2	Warkop JSS99	Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur	- Perlu eningkatan di dibidang pembuatan kopi Bisa di upgrade menjadi WD dengan pembaharuan fasilitas
3	Warkop Aksara	Jl. Gebang Putih No.107, Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60117	Perlu peningkatan dan pembaharuan fasilitas terutama khususnya tempat meja dan kursi Masih belum tersedia alat pembuat kopi yang lengkap Belum melayani pembayaran digital
4	Warung Kopi Indonesia	Jl. Jarak No.76, Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota SBY, Jawa Timur 60253	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu peningkatan dan pembaharuan fasilitas bagian kursi dan meja pelanggan</li> <li>- Masih belum tersedia alat pembuat kopi kekinian</li> <li>- Belum melayani pembayaran digital</li> <li>- Pemilik warkop masih perlu waktu untuk mikirkan keuangan terlebih dahulu</li> </ul>
5	Warkop Butong	Jl. Keputih Tegal Timur No.C - 17, Keputih, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60111	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu peningkatan dan pembaharuan fasilitas untuk pelanggan</li> <li>- Sudah tersedia beberapa alat pendukung pembuatan kopi</li> <li>- Sudah melayani pembayaran digital</li> <li>- Pemilik warkp masih memikirkan dan berdiskusi dengan internalnya untuk memutuskan menjadi mitra atau tidak</li> </ul>

6		Jl. Jemur Andayani No.17 A, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60237	- Perlu peningkatan di bidang PPOB - Pembaharuan fasilitas kedai diperlukan - Pemilik kedai masih menimbang penawaran dengan berdiskusi pada internalnya
7	Warkop Podo Ngopi	Kota SBY, Jawa Timur 60236	- Perlu peningkatan di bidang PPOB - Dapat diupgrade menjadi WD dengan fasilitas yang lebih mumpuni - Pemilik kedai tertarik untuk bekerja sama namun akan dilakukan follow up dan mengatur jadwal pertemuan dengan perusahaan
8	UPN Veteran Surabaya	Jl. Rungkut Madya No.1, Kec. Gn. Anyar, Kota SBY, Jawa Timur 60294	Telah dilakukan diskusi antara Inkubator Bisnis dengan perusahaan dan menunggu respon dari Inkubator Bisnis untuk pembahasan MoU

Setelah menjalani survey lokasi, banyak sekali yang menjadi hambatan penerapan kolaborasi pemerintah dengan swasta dalam kerjasama sektor publik dan privat melalui collaborative governance. Berdasarkan hasil kunjungan atau survey lokasi yang telah dilakukan mendapatkan data hasil survey yang dimana para pelaku usaha mengalami kendala internal dari program Warkop Digital oleh PT Cyber Global Indonesia, kendala utama mereka adalah masalah modal, kurangnya kepercayaan dan juga belum terbiasa dengan aplikasi digital yang telah tersedia di Indonesia. Jadi perlu adanya penjelasan, pendekatan, komitmen antara pelaku usaha, pemerintah dan juga swasta secara menyeluruh dan harus benar-benar dipahami oleh pelaku usaha pentingnya pemanfaat teknologi atau aplikasi digital dalam mengembangkan usaha yang dimiliki.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa selama menjalani survey dengan mengikuti program Warkop Digital di PT. Cybers Global Indonesia penulis dapat mengetahui bagaimana cara mengembangkan bisnis dan juga sistem kerjasama antara pemerintah sebagai sektor publik dengan PT Cybers Global Indonesia sebagai sektor privat dalam usaha mengembangkan dan mencerdaskan para masyarakat sebagai pelaku UMKM khususnya dibidang warung kopi agar dapat berjalan berdampingan dengan teknologi digital saat ini yang semakin berkembang dan memudahkan dalam efektivitas pekerjaan serta penjualan agar meningkat dengan menggunakan teknologi yang tersedia tanpa merugikan para pelaku usaha dan menjadikan media teknologi sebagai sarana mereka dalam melakukan pengembangan bisnis namun kurangnya penjelasan pendekatan dan sosialisasi dari pemerintah Sebagian besar pelaku usaha kurang memahami penggunaan aplikasi digital dalam usahanya.

## SARAN

Setelah melakukan kegiatan survey di lapangan saya sebagai penulis ingin memberikan sedikit saran serta masukan untuk perbaikan terkait penerapan collaborative governance yang dilakukan yaitu

1. Instansi pemerintah sebagai sektor publik perlu menggalakan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat terkait penggunaan teknologi yang berbasis digital tentunya bisa digunakan dalam keseharian pengusaha melakukan penjualan yang dilihat melalui media digital. Tak hanya menggalakan teknologi namun juga perlu mendukung dan mencari solusi dalam permasalahan keuangan yang dirasa sangat sensitive bagi pelaku usaha

2. Sebagai sektor privat PT Cybers Global Indonesia telah baik dalam melakukan penawaran kemitraan melalui program Warkop Digital namun perlu diketahui dengan penawaran yang dilakukan harus lebih dijelaskan secara jelas khususnya terkait konsep kemitraan yang ditawarkan dan keuntungan serta fasilitas yang didapatkan ketika telah menjalin kemitraan apakah sebanding dengan harga yang ditawarkan atau tidak.
3. Kepada masyarakat juga perlu adanya pemahaman bagaimana pemanfaatan dari program yang ditawarkan oleh pemerintah maupun swasta dalam mendukung pengembangan UMKM khususnya warung kopi yang seharusnya saat ini dapat mengikuti perkembangan teknologi dan perlu adanya kesadaran masyarakat dalam penerapan collaborative governance ini sehingga dapat tercipta UMKM yang lebih baik sesuai dengan perkembangan saa

#### DAFTAR PUSTAKA

- Faidati, N., & Muthmainah, N. F. (N.D.). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Umkm Di Era Revolusi Industri.
- Fuadi, D. S., Akhyadi, A. S., & Saripah, I. (2021). Systematic Review: Strategi Pemberdayaan Pelaku Umkm Menuju Ekonomi Digital Melalui Aksi Sosial. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.21831/Diklus.V5i1.37122>
- Nur Sarfiah, S., Eka Atmaja, H., & Marlina Verawati, D. (2019). Jurnal Rep (Riset Ekonomi Pembangunan) Umkm Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa Msmes The Pillar For Economy. *Riset Ekonomi Pembangunan*, 4(1). <https://doi.org/10.31002/Rep.V4i2.1952>
- Parlina, R. (2022). *Arajang: Jurnal Ilmu Sosial Politik*. 5(1), 58–68.
- Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah, S. (2020). Kolaborasi Dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 61–80.
- Supartoyo, Y. H., Riset, P., Makro, E., Keuangan, D., Riset, B., Nasional, I., & Dki, J. (N.D.). Digitalisasi Bidang Ekonomi Dan Keuangan Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah Wilayah Sumatera. <https://indeks-inovasi.brin.go.id/>